

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kudeta Junta Militer Myanmar terjadi karena ketidakpuasan pihak militer atas hasil pemilihan umum pada 08 November 2020. Kekalahan suara partai milik junta militer *Union Solidarity and Development Party (USDP)* atas partai *National League for Democracy (NLD)* dinilai oleh militer dikarenakan kecurangan dalam pemilihan umum, dimana NLD memperoleh 346 kursi dan USDP hanya mendapat 33 kursi saja (Wirawan, 2021). Hal ini diindikasikan oleh Militer sebagai kecurangan yang kemudian Junta militer mengambil alih pemerintahan Myanmar dan menangkap Aung San Suu Kyi serta para politisi dari partai NLD dengan dalih akan melakukan pemilihan ulang supaya pemilihan berjalan dengan adil (Herawati, 2021).

Dalam menanggapi hal yang terjadi di Myanmar, Indonesia secara aktif melakukan upaya sebagai inisiatif menggerakkan anggota ASEAN untuk menjaga kestabilan keamanan di ASEAN (Malau, 2021). Retno Marsudi selaku Menlu menyampaikan sikap Indonesia pada Menlu Myanmar U Wunna Maung Iwin, untuk memprioritaskan keselamatan sipil dalam menyelesaikan konflik dan meminta semua pihak untuk tidak gegabah serta menggunakan cara damai. Bersama dengan Malaysia, Indonesia mendorong negara-negara ASEAN untuk membahas resolusi dalam menyelesaikan krisis Myanmar dalam pertemuan khusus yang kemudian berlangsung pada 2 Maret 2021. Indonesia pada pertemuan tersebut

menekankan pada tiga poin yaitu meminta militer untuk tidak menggunakan kekerasan karena keselamatan dan kesejahteraan rakyat adalah hal utama. Kedua, dibukanya akses untuk masyarakat Myanmar yang memerlukan bantuan kemanusiaan. Terakhir, menjaga perdamaian dan stabilitas di kawasan Asia Tenggara. Kebijakan Indonesia untuk mempengaruhi negara-negara ASEAN ini tentunya menarik untuk dibahas di dalam studi HI, namun demikian nampaknya kurang tepat jika mengupas *case* ini dengan teori HI Barat yang cenderung lebih ke perspektif negara-negara Barat dalam mengambil kebijakannya.

Dalam studi HI, kebijakan-kebijakan luar negeri sebuah negara tentunya sejalan dengan *National interest* negara tersebut. Untuk mengkajinya kebanyakan penstudi HI akan menggunakan teori-teori *mainstream* seperti realisme, liberalisme, konstruktivisme dan teori-teori barat lainnya. Namun kebanyakan teori tersebut berasal dari pemikiran orang-orang barat yang mana tentunya kondisi negara-negara barat dengan negara-negara Timur dan selatan memiliki perbedaan baik dilihat dari kondisi geopolitik, kultur masyarakat, ekonomi dan lainnya. Hal ini tentunya membuat teori non barat dirasa kurang relevan jika digunakan untuk menjelaskan isu-isu kawasan Asia, maka dibutuhkanlah teori HI non Barat yang berasal dari pemikiran lokal untuk menjawab isu-isu di kawasan Asia khususnya Asia Tenggara (Kang, 2003). Teori non Barat baru mendapat perhatian ketika terbit jurnal dari *International Relations of the Asia-Pacific* (IRAP) yang membahas mengenai teori-teori HI non Barat yang dibuka dengan diskusi “*why is there no non-western international relations theory?*” oleh Amitrav Acharya dan Barry Buzan yang kemudian menimbulkan debat panjang yang menarik. Mereka

menganalisa terdapat lima hal yang membuat teori HI non Barat jarang muncul yaitu :

- a. Teori HI barat memberi sumbangsih besar pada cara pemahaman dunia.
- b. Sumber daya yang tidak terbatas menjadikan teori HI Barat memiliki status hegemonik terlebih dalam sejarah kolonialisme dilakukan Barat selama berabad-abad.
- c. Dampak dari hegemoni barat juga membuat kebudayaan barat menjadi superior sehingga menyingkirkan pemikiran-pemikiran lokal atau dari budaya lain.
- d. Kebanyakan negara-negara non Barat merupakan negara berkembang yang memiliki banyak sekali masalah sehingga perkembangan ilmu di negara non Barat terhambat.
- e. Barat menjadi pelopor dalam teori-teori HI sehingga memaksa non Barat untuk mengikutinya.

Namun dengan munculnya karya Amitrav dan Buzan memberi dorongan pada teori non Barat untuk muncul ke permukaan yang kemudian mulai bermunculan teori-teori HI non-Barat seperti munculnya *Chinese School* yang berkembang di China dan mengembangkan banyak pemikiran-pemikiran, beberapa dari pemikiran tersebut seperti konsep *Tingyang Zhao* dengan gagasan *Tianxia*-nya, *Qin Yaqing* dengan teori relasional dan *Yan Xuetong* yang membawa teori realisme moral (Rosyidin M. , 2020). Sayangnya untuk teori HI non barat di Indonesia belum berkembang pada level dimana Indonesia memiliki teori HI-nya sendiri seperti China. Dalam hal ini terjadi karena hubungan yang tidak timbal balik antara

akademisi HI yang merumuskan konsep dengan praktisi lapangan yang mana para akademisi ini telah memberikan rumusan namun praktisi lapangan menganggap bahwa rumusan yang diberikan sangat jauh dari fakta di lapangan.

Dalam keadaan ini Acharya dan Buzan selaku pelopor teori HI non Barat menawarkan empat tipe sumber utama dalam merumuskan teori HI non Barat. Pertama, sumber harus berfokus pada pemikir-pemikir lokal. Kedua, dalam merumuskan teori harus mengambil dari pemikiran-pemikiran tokoh pemimpin negara dan juga para pemangku kebijakan yang berpengaruh pada kebijakan luar negeri negara. Ketiga, sumber data utama harus diambil dari data *experience* lokal. Keempat, sumber data berfokus pada penggalian sumber-sumber lokal (Yusli Effendi and Dion Maulana, 2016). Dari keempat tipe ini yang mungkin cocok dengan falsafah budaya Jawa yakni tipe keempat yang relatif tidak terpengaruh oleh barat. Budaya Jawa adalah salah satu dari banyaknya kebudayaan yang ada di negara Indonesia yang mana budaya ini dapat dijadikan sebagai sumber tipe keempat untuk melihat dunia dari sudut pandang baru, namun demikian sampai saat ini belum ada teori HI non barat yang dapat dipadukan dengan sumber pemikiran falsafah budaya Jawa sebagai sumbernya yang tentu hal ini menyulitkan bagi penulis untuk tidak menggunakan teori barat sebagai kerangka teorinya. Dari sekian banyak teori HI non Barat, penulis tidak menemukan kecocokan untuk menggunakannya sebagai payung untuk kebudayaan Jawa, maka dari itu penulis akhirnya lebih menggunakan pendekatan berfikir ketimbang teori dalam penelitian ini sehingga dapat menggunakan falsafah budaya Jawa sebagai perspektif secara utuh tanpa terpengaruhi oleh teori-teori barat.

1.2.Perumusan Masalah

Dalam penyelesaian krisis politik Myanmar, Indonesia melalui kebijakan luar negerinya sangat pro-aktif dalam mendorong negara-negara ASEAN untuk membahas permasalahan Myanmar ini. Yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana pengaruh norma Jawa pada kebijakan luar negeri Indonesia dalam konflik militer Myanmar ?

1.3.Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan bagaimana pengaruh norma Jawa dalam kebijakan luar negeri Indonesia untuk mengambil langkah mengenai konflik yang terjadi antara junta militer dan pemerintahan Aung San Su Kyi di Myanmar.

1.4.Manfaat Penelitian

Kegunaan dari penelitian ini adalah memberikan tambahan pengetahuan ilmu akademik terhadap kebijakan luar negeri Indonesia dalam membantu menyelesaikan konflik junta militer Myanmar. Kemudian penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah ilmu pengetahuan studi HI terkhusus dalam kajian ilmu HI di kawasan Asia Tenggara. Kemudian yang terakhir, penelitian ini bermanfaat dalam pengimplementasian pemikiran lokal yang mana dalam studi HI masih didominasi oleh teori-teori HI Barat yang cenderung dipengaruhi oleh kepentingan Amerika, sehingga dengan penggunaan falsafah budaya Jawa sebagai payung berfikir dalam penelitian ini dapat menambah pengetahuan dalam penggunaan pemikiran lokal pada ilmu HI.

1.5. Tinjauan Pustaka

Penelitian-penelitian sebelumnya yang membahas menggunakan norma Jawa dalam melihat permasalahan regional Asia Tenggara sangatlah langka, sehingga sulit untuk mencari perbandingannya. Setidaknya terdapat lima tulisan yang kompatibel dengan penelitian ini. Penelitian pertama berjudul “ Falsafah Kepemimpinan Bangsa Dalam Paribasan Jawa” karya Iqbal Nurul Azhar. Dalam karya ini dijelaskan mengenai falsafah yang tersebar dimasyarakat secara tidak sadar dimana dalam karya ini membahas falsafah kepemimpinan Jawa yang bersumber dari paribasan yang berbagai macam. Setidaknya terdapat 15 paribasan yang dipaparkan dalam artikel ini. Salah satu paribasan dalam kepemimpinan Jawa yang dibahas adalah *rukun agawe santosa, crah agawe bubrah* (rukun membuat santosa, bertengkar membuat rusak), dimana paribasan ini menunjukkan cita-cita hidup masyarakat Jawa sesungguhnya hidup secara rukun dan damai (Nurul Azhar, 2011).

Kemudian karya kedua berupa artikel yang berjudul “Kritik Jawa atas Teori Hubungan Internasional Barat” karya Effendi dan Maulana yang berargumen bahwa konsep *power* dalam kejawaan memiliki landasan ontologi dan epistemologi yang berbeda dengan barat. Untuk ontologi, Jawa memandang anarki, *balance of power*, dan sejenisnya tidaklah berpengaruh. Kemudian secara epistemologis budaya jawa, kekuasaan memiliki sifat yang konkret, homogen dan melebihi dari batas moralitas (Yusli Effendi and Dion Maulana, 2016). Tulisan selanjutnya adalah buku berjudul “ Politik Luar Negeri Indonesia Dalam Perspektif Budaya Jawa dari Sukarno Sampai Joko Widodo” karya Mohamad Rosyidin. Buku ini

secara umum menafsirkan kebijakan-kebijakan luar negeri Indonesia pada masing-masing era kepemimpinan presiden menggunakan filosofi Jawa. Lebih lanjut, membahas mengenai kebijakan politik luar negeri era Joko Widodo yang ditafsirkan menggunakan filosofi *nglurug tanpo bolo, menang tanpo ngasorake* (berjuang tanpa massa, menang tanpa mencela) yang diorientasikan pada studi kasus diplomasi senyap dalam isu rohingnya (Rosyidin, 2020).

Karya keempat yang menjadi tinjauan bagi penelitian ini adalah “Militer Myanmar Mengambil Alih Pemerintahan” yang digubah oleh Muthia Muharani. Tulisan ini berangkat dengan 3 pertanyaan dasar yang berputar seputar kudeta yakni (1). Apa yang terjadi dengan Myanmar ketika pemerintah ASEAN berkuasa (2). Bagaimana kelanjutan perlawanan ASEAN vs Myanmar (3). Mengapa tentara Myanmar berani melakukan kudeta saat rakyat tidak menginginkannya (Muharani, 2022). Dan karya terakhir yang dijadikan tinjauan yakni jurnal yang berjudul “Pengaruh Kudeta Militer Myanmar Terhadap Stabilitas Kawasan ASEAN Pada Tahun 2021” karya Fadhlana, Annisa dan Tania. Dalam jurnal ini membahas bagaimana tanggapan dari negara-negara anggota ASEAN pada konflik Myanmar yang terkendala karena prinsip non-intervensi, serta memberikan suatu jalan keluar bagi ASEAN dengan mendorong ASEAN untuk mengambil keputusan substantif, pembatasan kerja sama dan menyepakati rencana yang kemudian diberikan pada Myanmar untuk menjamin Lima Poin Konsensus diterapkan (Fadhlana, Annisa, & Tania, 2022).

Kelemahan dari penelitian pertama adalah tidak adanya studi kasus yang dibahas untuk penerapan falsafah kepemimpinan Jawa dan hanya menjelaskan apa

itu kepemimpinan Jawa dari segi *paribasan* Jawa sehingga tidak dapat menjadi bukti pengaruh paribasan pada kepemimpinan orang Jawa. Kemudian kelemahan pada karya kedua yakni lebih menekankan pada politik penyerapan yang mana mengutamakan stabilitas dan keamanan yang dilihat dari beberapa kasus di era Soekarno dan Soeharto yang dalam tulisan tersebut dijelaskan bahwa pemikiran dua tokoh tersebut masih terpengaruhi neorealis yang menjadikan ketidaksinambungan dengan filosofi budaya Jawa yang dijelaskan dalam karya tersebut. Karya ketiga memiliki kelemahan pada penggunaan filosofi Jawa yang kurang mendalam yang mana satu filosofi Jawa digunakan untuk menafsirkan tiga kebijakan politik Jokowi.

Selanjutnya kelemahan pada penelitian keempat terletak pada tidak digunakannya teori atau pondasi tafsiran yang sebagai alat analisis, namun menggunakan 1. XII, No.4/II/Puslit/Februari 2021 jalur ketatanegaraan yang memikat TNI via perebutan kekuasaan sebagai tafsirannya, yang membuat hal ini tidak sinkron baik dengan 3 pertanyaan inti yang membahas peran ASEAN dan juga tidak sesuai dengan pembahasan konflik militer Myanmar. Kemudian karya terakhir memiliki beberapa kelemahan yakni yang pertama terkait pendekatan yang digunakan adalah keamanan regional yang dikemukakan oleh John Baylis yang mana mengambil sampel pada masa perang dingin dimana tentunya dipengaruhi oleh perang ideologi liberal dan komunis. Hal ini tentu akan berperanguh pada *point of view* yang digunakan tidak sinkron karena keamanan regional di ASEAN tidak mengarah seperti negara-negara barat yang memandang keamanan dari bidang militer, politik, ekonomi, lingkungan, dan sosial masing-masing negara sama rata. Namun lebih kepada penciptaan harmonisasi antar anggota ASEAN. Kemudian

kelemahan selanjutnya pada tulisan ini terletak pada solusi yang diberikan yang kontradiktif dengan prinsip non-intervensi ASEAN. Ketimbang memberikan solusi dengan memberikan *soft effect*, karya ini justru memberikan solusi yang dimungkinkan akan membuat Myanmar merasa terintervensi yang berakibat pada kerenggangan hubungan Myanmar dengan negara-negara ASEAN semakin besar yang berdampak pada mundurnya penyelesaian masalah ini.

Berbeda dengan tinjauan pustaka diatas, penelitian penulis lebih berarah pada pengaruh norma Jawa pada kebijakan luar negeri yang dikeluarkan oleh Indonesia pada konflik Myanmar. Penelitian ini tidak membahas konsep *power* dalam budaya Jawa yang tidak berpengaruh dalam pengambilan kebijakan luar negeri, namun lebih menitikberatkan harmoni antar negara menurut falsafah budaya Jawa. Dalam sudut pandang barat harmoni ini sejajar dengan istilah *balance of power* namun disisi lain juga berbeda, dimana *balance of power* melihat keseimbangan dicapai dengan kesamaan kekuatan secara militer atau ekonomi sedangkan pemikiran budaya Jawa lebih kepada hubungan kerjasama yang baik tanpa memandang kekuatan negara lain.

Penelitian ini juga berbeda dengan karya Rosyidin terkhusus pada penggunaan filosofi Jawa sebagai *point of view* kebijakan Indonesia. Penelitian ini berfokus pada satu *case* serta satu norma Jawa yang kompleks karena berbeda dengan barat, norma Jawa mengandung banyak makna eksplisit dan implisit. Selain itu, norma Jawa tidak terbentuk secara mandiri melainkan terbentuk dari banyaknya filosofi lain didalam satu filosofi Jawa itu sendiri. Maka dari itu penulis

melihat karya Rosyidin belum sepenuhnya mengeksplorasi kedalaman satu filosofi Jawa dan hanya membahas luarnya saja.

1.6.Kerangka Pemikiran

Penelitian ini akan menggunakan konsep konstruktivis berbasis norma untuk menjelaskan dimana letak falsafah Jawa *Siji Wadah Ojo Nganti Pecah* dalam kebijakan luar negeri Indonesia terkait Konflik Myanmar ini. Konstruktivis adalah salah satu dari banyaknya pendekatan yang ada di ilmu HI yang mana konstruktivis hadir untuk memberikan alternatif baru dalam melihat masalah internasional yang tidak bisa dijelaskan oleh realis dan liberalis. Tidak seperti realis yang melihat national interest dipengaruhi oleh power dari segi militer ataupun liberalis yang lebih mementingkan kerjasama bilateral dalam bentuk pembangunan ekonomi, konstruktivis justru melihat dari tiga poin berikut. Pertama, pemikiran konstruktivisme lebih lebih condong kepada pemikiran idealis ketimbang materialistis sehingga suatu fenomena internasional dianggap mengancam atau tidak bergantung kepada konstruksi sosial dari para aktor. Kedua, konstruktivis melihat bahwa hubungan antara agen dan struktur itu saling mempengaruhi di mana struktur sosial membentuk interaksi sosial antara agen dan sebaliknya interaksi sosial dipengaruhi juga oleh struktur sosial. Ketiga, perilaku agen dalam konstruktivis pada dasarnya ada karena dorongan norma yang tentu berbeda dari kaum rasionalis yang lebih melihat perilaku agen berdasarkan pada logika konsekuensi (Bakry, 2017).

Konstruktivis sendiri memiliki beberapa pendekatan yang biasa kalangan pelajar Hubungan Internasional gunakan seperti konstruktivis berbasis identitas, konstruktivis berbasis bahasa dan konstruktivis berbasis norma. Aliran konstruktivis berbasis identitas didasari pada pemikiran beberapa tokoh seperti Alexander Wendt, Ted Hopf, dan Emanuel Adler dimana lebih menyoroti pada negara sebagai. Kemudian konstruktivisme berbasis bahasa atau disebut juga konstruktivisme linguistik berakar dari konsep filosofi permainan bahasa yang dikemukakan oleh Austria Ludwig Wittgenstein yang inti dari gagasannya adalah makna dari kata-kata tidak terletak pada makna didalamnya namun lebih kepada pemakaian kata tersebut digunakan untuk apa. Kemudian aliran konstruktivis berbasis norma yang dipelopori oleh Martha Finnemore, Amitrav Acharya dan Kathryn yang melihat bahwa perilaku negara bukan hanya dikendalikan oleh *national interest* namun juga dipengaruhi oleh norma yang berlaku (Rosyidin M. , 2020).

Konstruktivis berbasis norma setidaknya memiliki dua cabang yakni norma domestik dan norma internasional. Norma domestik dipahami sebagai norma yang dibuat dan berlaku di masyarakat di dalam negeri sedangkan norma internasional dibuat oleh masyarakat internasional. Menurut McDonald dan Crandall (2015) norma diartikan sebagai rincian mengenai apa yang pantas dan tidak pantas dilakukan oleh individu dalam kelompok maupun kelompok dalam masyarakat yang lebih luas (McDonald, 2015). Dalam masyarakat setidaknya terdapat empat macam norma yakni norma agama yang bersumber dari agama, kemudian norma kesusilaan yang sumbernya berasal dari hati nurani manusia, norma hukum yang

bersifat mengikat dan memaksa masyarakat untuk menaatinya dan terakhir norma kesopanan yang bersumber dari lingkungan tempat dimana kita tinggal. Dalam berkehidupan masyarakat Jawa bertingkah dan berperilaku sejalan dengan norma yang ada didalam budaya Jawa yang mana mengikuti pemaknaan dari Niels Mulder, Franz Magnis suseno dan Mohammad Rosyidin yang menitik beratkan budaya bukan sebagai agama namun sebagai etika atau *the ways of life*.

Walaupun dalam pembentukannya, budaya Jawa dipengaruhi oleh nilai-nilai dan ajaran beberapa agama seperti hindu, buddha dan islam yang mengalami asimilasi dengan kebiasaan masyarakat jawa yang membuat seolah budaya Jawa lekat dengan norma agama namun pengaruh lainnya tidak dapat diabaikan. Nilai ajaran dari hindu buddha dapat dilihat dari sumber sanskerta kuno yang termuat dalam Babad Tanah Jawi yaitu *pararaton*, dan *negarakertagama* dalam sejarah Mataram kuno, pengaruh ajaran islam yang dibawa oleh pedagang gujarat, arab dan persia yang memunculkan filosofi baru dalam kebudayaan jawa yang dalam penyebarannya dibawa oleh *Wali Songo* dan diterapkan oleh kerajaan-kerajaan Jawa seperti Kerajaan Demak dan Kerajaan Pajang. Maka secara sadar maupun tidak sadar, budaya jawa mencapai dasar dari rujukan untuk menjelaskan perilaku praktis dalam kehidupan sehari-hari (mulder, 2001).

Salah satu cara untuk mengajarkan moral dalam masyarakat Jawa melalui *pitutur* yang berkembang di masyarakat dan lambat laun menjadi sebuah norma. *Siji Wadah Ojo Nganti Pecah* adalah salah satu pitutur yang berada dalam masyarakat Jawa. Pitutur ini dalam Bahasa Indonesia memiliki arti satu wadah jangan sampai pecah memiliki makna menjaga hubungan baik dengan yang lain

yang menunjukkan bahwa orang Jawa memprioritaskan teriptanya harmonisasi dalam kehidupan. *Pitutur* ini dipopulerkan oleh Habib Syech Assegaf melalui syi'ir “*zaman wes bubrah*” yang dilantunkan dalam majelis-majelis sholawatnya. Yang kemudian pitutur ini menyebar luas di tempat-tempat dimana majelis sholawat Habib Syech digelar seperti di Semarang, Demak, Pekalongan, Kendal dan lainnya (Nur, 2022).

Konsep *Siji Wadah Ojo Nganti Pecah* ini sesuai dengan perspektif budaya Jawa yang dikemukakan oleh Mohammad Rosyidin yang lebih berfokus pada penafsiran dari kebijakan luar negeri Indonesia dibandingkan pembuktian teori (Rosyidin M. , 2020).

1.7. Definisi Konseptual

1.7.1. Kebijakan Luar Negeri

Kebijakan luar negeri adalah kebijakan yang dibuat oleh negara berdaulat untuk berinteraksi dengan negara berdaulat lainnya. Kebijakan luar negeri dibuat untuk menyelesaikan masalah ataupun membuat perubahan di suatu kawasan (Holsti, 1983). Menurut K.J. Hosti melihat kebijakan luar negeri memiliki tujuan yang terpaku pada 3 syarat utama yaitu :

- a. Waktu. Dalam menjalankan kebijakan luar negeri tentunya membutuhkan waktu tertentu dalam prosesnya guna mencapai tujuan utama dari kebijakan luar negeri.

- b. Nilai. Kebijakan-kebijakan suatu negara tentunya memiliki kepentingan nasional yang ingin diraih dan hal ini harus difokuskan pada seberapa besar nilai dari kebijakan tersebut untuk negara.
- c. Tuntutan tujuan. Negara yang menjadi tujuan dari kebijakan luar negeri akan mendapat beban dari negara yang mengeluarkan kebijakan luar negeri.

Indonesia sendiri dalam berinteraksi dengan dunia internasional menggunakan politik bebas aktif yang diperkenalkan oleh Mohammad Hatta kemudian dilanjutkan sampai di era Presiden Jokowi saat ini. Kebijakan luar negeri Indonesia sendiri memiliki 3 landasan utama yaitu :

- a. Landasan ideal yang berakar dari Pancasila.
- b. Landasan konstitusional, dalam hal ini termaktub dalam pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Alinea 1 dan 4.
- c. Landasan operasional. Dalam menjalankan kebijakannya, Indonesia memiliki karakter politik bebas aktif dan termuat dalam Undang-Undang NO.37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri (Yulianto, 2008).

1.7.2. Norma

Norma merupakan pedoman dalam bertindak yang menjelaskan apa yang pantas dan yang tidak dalam bermasyarakat, hal ini sejalan dengan definisi dari McDonald dan Crandall yang mendeskripsikan norma sebagai rincian mengenai

apa yang pantas dan tidak pantas dilakukan oleh individu dalam kelompok maupun kelompok dalam masyarakat yang lebih luas lagi (McDonald, 2015). Dalam karya jurnal Yustinus Suhardi dijelaskan bahwa norma memiliki empat jenis berdasarkan daya pengikatnya yakni cara, kebiasaan, adat istiadat dan tata kelakuan. Yang dimaksud dengan cara adalah tindakan yang lebih mengedepankan pada hubungan yang terjadi antar individu dalam masyarakat namun tidak kontinu sehingga daya ikatnya lemah sehingga sanksi yang didapat tidak berat, namun hanya ejek-an atau celaan saja seperti meludah ditempat umum yang mana hal ini dianggap tidak sopan namun sanksi yang diberikan hanya teguran atau celaan. Kemudian maksud dari kebiasaan yakni norma yang memiliki kebiasaan adalah bentuk dari tindakan yang dilakukan secara berulang dengan bentuk yang sama dan dilakukan secara sadar. Kebiasaan ini memiliki daya ikat yang lebih tinggi daripada cara..

Jenis ketiga adalah adat istiadat dimana dalam adat istiadat terdapat tata kelakuan yang bersifat hampir mutlak kepada masyarakat yang memiliki adat tersebut. Norma ini memiliki daya ikat yang paling tinggi dan jika dilanggar akan mendapat sanksi yang cukup keras di masyarakatnya seperti melaksanakan syukuran jika memiliki mobil baru, dimana jika tidak dilakukan maka masyarakat disekitar akan mulai mencemoohnya. Dan jenis terakhir adalah tata kelakuan yang didasarkan pada ajaran agama, budaya dan filsafat yang diadopsi oleh masyarakat dan digunakan sebagai alat kontrol masyarakat kepada anggotanya.

Norma yang digunakan dalam penelitian ini termasuk dalam norma jenis tata kelakuan yang mana bersumber dari filsafat budaya Jawa yang diajarkan pada masyarakat Jawa menggunakan *pitutur* yakni *siji wadiah ojo nganti pecah* yang

memiliki arti satu wadah jangan sampai pecah yang menggambarkan niat masyarakat Jawa untuk menjaga harmonisasi kehidupan bermasyarakat..

1.8.Definisi Operasional

1.8.1. Kebijakan Luar Negeri

Implementasi konsep kebijakan luar negeri Indonesia dalam penelitian ini adalah kebijakan Luar Negeri Indonesia yang menjadi penengah antara junta militer Myanmar dengan pemerintahan sipil. Setelah berita tentang terjadinya kudeta militer di Myanmar pada tanggal 1 Februari 2021, Presiden Jokowi bergerak cepat dengan menerima kunjungan Tan Sri Muhyiddin Yassin selaku Perdana Menteri Malaysia pada 5 Februari yang kemudian disusul dengan mengadakan pembicaraan dengan Brunei selaku ketua ASEAN guna membawa masalah ini untuk dibahas di pertemuan tingkat tinggi ASEAN. Kebijakan luar negeri yang diambil oleh Indonesia tentu menimbulkan sebuah pertanyaan kenapa Indonesia menaruh diri sebagai penengah dan terlibat aktif untuk menyelesaikan konflik yang terjadi di negara tetangga.

1.8.2. Norma

Implementasi dari konsep norma pada penelitian ini digunakan untuk memberikan sudut pandang norma Jawa yang terdapat dalam kebijakan luar negeri Indonesia pada masalah Myanmar yang sejalan dengan norma-norma masyarakat Jawa. Dimana norma Jawa ini merupakan salah satu dari perwujudan *the power of ideas* dalam studi HI yang kurang mendapat perhatian karena dinilai lemah secara pembuktian namun berdampak besar bagi pembuatan kebijakan suatu negara.

dalam filosofi *siji wadiah ojo nganti pecah* ini terdapat beberapa filosofi lain yang saling berkesinambungan seperti *sepi ing pamrih rame ing gawe* (sedikit mengharap imbalan, banyak bekerja), *memayu hayuning buwono* (memperindah dunia), *tepo sliro* (mendengar apa yang orang lain rasakan), dan *urip iku urup* (hidup itu menyala).

1.9.Argumen Penelitian

penelitian ini berargumen bahwa kebijakan luar negeri Indonesia pada 2021 terkait konflik internal Myanmar kompatibel dengan Norma Jawa. Dalam hal ini norma Jawa memberikan pemahaman berbeda dalam melihat kebijakan yang dikeluarkan Indonesia pada konflik Myanmar. Dimana filosofi *siji wadiah ojo nganti pecah* (satu wadah jangan sampai pecah/hancur) dapat menafsirkan kebijakan luar negeri indonesia dalam isu konflik Myanmar . Yang mana didalam filosofi ini juga mengandung banyak filosofi-filosofi jawa lain yaitu *sepi ing pamrih rame ing gawe* (sedikit mengharap imbalan, banyak bekerja), *memayu hayuning buwono* (memperindah dunia), *tepo sliro* (mendengar apa yang orang lain rasakan), dan *urip iku urup* (hidup itu menyala).

1.10. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif yang menghasilkan sebuah data berbentuk tulisan, ucapan, serta perilaku individu-individu yang diamati dalam penelitian (Bogdan & Biklen, 1992). Metodologi kualitatif merupakan tradisi tertentu dalam ilmu-ilmu sosial yang pada dasarnya

bergantung pada pengamatan orang dengan cara mereka sendiri dan berhubungan dengan orang-orang ini dalam bahasa dan peristiwa mereka (Kirk & miller, 1986).

1.10.1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian dalam penelitian ini menggunakan tipe eksplanatif, yang didukung oleh data-data untuk menjelaskan kebijakan luar negeri Indonesia menanggapi konflik yang terjadi di Myanmar, yang kemudian penelitian ini dianalisis menggunakan perspektif budaya jawa.

1.10.2. Situs Penelitian

Situs penelitian ini berada di kampus penulis di Universitas Diponegoro dan rumah penulis di Demak.

1.10.3. Subjek Penelitian

Subjek dari penelitian ini adalah kebijakan luar negeri Presiden Jokowi dalam menyelesaikan konflik Myanmar.

1.10.4. Jenis Data

Jenis data yang digunakan kualitatif yang diperoleh dari data sekunder yang diperoleh dari buku-buku, penelitian-penelitian terkait dengan penelitian ini, artikel dan jurnal dalam internet yang relevan dengan penelitian ini.

1.10.5. Sumber Data

Sumber data dari penelitian ini menggunakan sumber data sekunder. Sumber data sekunder dari penelitian ini adalah artikel, berita, dan jurnal dalam internet serta buku-buku yang relevan dengan penelitian ini.

1.10.6. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah *desk research* yang menggunakan *library research* dan *internet research*. *Library research* dilakukan dengan melakukan pengumpulan data dari buku-buku maupun sumber lain di perpustakaan. *internet research* dilakukan dengan pengumpulan data dari internet dengan memperhatikan sumber-sumber yang kredibel dan dapat dipertanggungjawabkan.

1.10.7. Analisis dan Interpretasi Data

Analisis dan interpretasi data adalah proses mengatur dan menafsirkan data-data hasil yang ditemukan, serta menghasilkan suatu pemikiran, pendapat, teori, atau gagasan baru secara sistematis yang kemudian dikembangkan berdasarkan dengan teori dan/atau konsep yang digunakan dalam penelitian. Dalam penelitian ini, analisis dan interpretasi data dilakukan dengan menggunakan Metode Analisis isi (*content analysis*). *Content analysis* adalah metode penelitian yang mendalam terhadap isi informasi tertulis atau tercetak dalam media massa, sering digunakan dalam penelitian kualitatif. Harold D. Lasswell adalah pelopor teknik ini dengan metode symbol coding, yaitu mencatat dan menginterpretasikan simbol atau pesan secara sistematis. Analisis isi mencakup semua analisis teks dan digunakan untuk

pendekatan analisis khusus. Menurut Holsti, ini adalah teknik untuk mengambil kesimpulan dengan mengidentifikasi karakteristik pesan secara objektif, sistematis, dan generalis (Eriyanto, 2011).

